

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1. Tinjauan Literatur

Pada kajian pustaka memuat hasil penelitian terdahulu dan konsep-konsep teori yang berhubungan dengan fokus penelitian:

Literatur pertama berjudul *a framework for analysing intergovernmental* ditulis oleh Emma Wong, Nina Mistilis, dan Larry Dwyer (Management, 2011) menjelaskan bahwa bertujuan untuk memberikan penilaian menyeluruh terhadap kemajuan yang dicapai ASEAN dalam pariwisata, mengidentifikasi *facilitator* dan penghambat, dan memberikan rekomendasi kebijakan memperkuat kolaborasi. Dan ditemukan langkah-langkah yang disarankan dalam rencana aksi, peta jalan integrasi sektor pariwisata, tidak dilaksanakan di semuanya atau bahkan sudah lewat waktu, meskipun kemajuan yang relative signifikan telah dicapai dalam fasilitasi perjalanan dan pengembangan sumberdaya manusia.

Berbagai faktor mempengaruhi kemajuan yang dicapai ASEAN, yang secara kolektif terus berkembang batas-batas sastra yang ada. Faktor-faktor tersebut dikelompokkan menjadi tiga dimensi kolaborasi: pemangku kepentingan, sumberdaya serta proses dan mekanisme. Pada dimensi sumberdaya, misalnya mengidentifikasi bahwa keuangan dan dukungan teknis yang diberikan oleh mitra sangat berperan dalam membantu anggota yang kurang berkembang, namun kurangnya sumber daya keuangan dan keahlian di bidangnya sekretariat ASEAN telah memperlambat proses kolaboratif secara keseluruhan. Untuk mempercepat dan meningkatkan kerjasama, memperbanyak petugas dengan tingkat pengetahuan

yang memadai di bidang pariwisata sangat dibutuhkan di sekretariat ASEAN, sehingga pada gilirannya diperlukan pemantauan yang kuat dan mekanisme evaluasi dapat dilakukan.

Selain itu literature ini sebagai titik awal dalam meningkatkan pemahaman mengenai fenomena dan unsur keberhasilan dan kegagalan. Pariwisata ASEAN beroperasi dalam konteks yang spesifik dan kompleks. Misalnya dalam menunjukkan cara entitas di luar ASEAN seperti ADB-GMS, mitra dialog, dan mungkin juga sektor swasta dapat berkontribusi dengan peningkatan beberapa pemangku kepentingan. Kemudian dalam literature ini juga memberikan saran kepada pembuat kebijakan untuk memperbaiki kondisi saat ini kolaborasi, yang pada gilirannya berpotensi meningkatkan kontribusi pariwisata terhadap pembangunan sosial dan ekonomi daerah.

Dengan seiring berkembangnya anggota ASEAN dalam perkembangan politik, sosial, ekonomi mereka di samping variasi dalam lingkungan ekonomi global dan peristiwa-peristiwa dramatis, hal sama juga terjadi akan sifat kolaborasi pariwisata mereka. Pembentukan dan perkembangan awal kolaborasi seperti itu tidak dapat dengan mudah disesuaikan dengan prototipe buku teks apapun dan dalam literature ini dapat melakukannya dengan menyediakan kerangka kerja yang melaluinya perkembangan masa depan dapat diamati, dianalisis dan dipantau. Ini merupakan langkah signifikan dalam pemahaman mengenai apa yang sebenarnya terjadi dalam sebuah fenomena yang dinamis (Management, 2011)

Literatur yang kedua ini dengan judul *Override parade: isu-isu pariwisata berkelanjutan pada destinasi kepulauan di Indonesia*, ditulis oleh Putu Diah Sastri

Pitanatri. Literature ini membahas mengenai bagaimana sektor pariwisata terutama destinasi kepulauan di Indonesia.

Literatur ketiga ini berjudul *Implementasi ASEAN Tourism Strategic Plan di Indonesia tahun 2016-2020*, yang ditulis oleh Vivin Wulandari (Wulandari, 2020). Literature ini membahas tentang implementasi ASEAN Tourism Strategic Plan di Indonesia dengan kebijakan dalam pariwisata berdasarkan kemauan serta target dari pengembangan pariwisata tercapai dengan baik. Dimana salah satu acuan yang digunakan dalam membuat kebijakan pariwisata Indonesia dengan melakukan pengimplementasian *ASEAN Tourism Strategic Plan 2016-2025* kedalam kebijakan pemerintah Indonesia di bidang pariwisata. Pengimplementasian ini dengan komponen-komponen kebijakan yang memiliki kesamaan dengan ATSP 2016-2025.

Dalam implementasinya kebijakan tersebut melibatkan pengembangan produk wisata melalui promosi serta pemasaran, investasi, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata. Strategi pemasaran, dan peningkatan kapasitas dan promosi sumberdaya manusia akan dijadikan dasar untuk kebijakan pariwisata Indonesia sesuai dengan strategi internasional. Terlepas dari fakta bahwa ATSP 2016-2025 membahas pariwisata regional dan sub-regional, fokus pada kebijakan Indonesia adalah pengembangan.

Strategi investasi dilakukan Indonesia adalah dengan memperkuat kemitraan dunia usaha dan investasi di bidang pariwisata sesuai arahan pertama pada ATSP 2016-2025 untuk meningkatkan daya saing ASEAN sebagai destinasi wisata yang unik dalam meningkatkan kapasitas dan kapabilitas sumberdaya. Poin-poin tersebut dimanfaatkan Indonesia untuk mengembangkan standard dan sertifikasi bagi

pelaku usaha pariwisata, mulai dari peningkatan layanan untuk pusat informasi, peningkatan kinerja pengelola pariwisata juga seperti peningkatan sarana dan prasarana pariwisata serta juga pemberdayaan masyarakat dengan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pariwisata dan potensinya. Pengembangan bisnis masyarakat kebijakan yang dikembangkan Indonesia untuk membangun masyarakat yang dapat mendukung pesatnya pembangunan Indonesia (Wulandari, 2020).

Keempat, literatur ini berjudul “*policy environment for the tourism sector’s adaptation to the south pacific – the case of Samoa*” yang ditulis oleh Emma Wong, Terry Delacy, Min Jiang, David Harrison (E. Wong et al., 2012). Berisikan mengenai Samoa dan negara-negara kepulauan Pasific yang rentan terhadap risiko perubahan iklim karena populasi dan infrastruktur mereka sebagian besar berlokasi di dataran rendah pesisir. Dampak perubahan iklim berpotensi menimbulkan bencana terhadap pariwisata yang merupakan sektor ekonomi utama di kawasan itu.

Dalam literatur ini mengkaji kondusifitas lingkungan kebijakan Samoa bagi sektor pariwisata untuk beradaptasi terhadap perubahan iklim dalam tiga dimensi; kemauan dan komitmen pemangku kepentingan, sumberdaya yang tersedia dan mekanisme pembuatan kebijakan. Namun terdapat kebutuhan yang kuat untuk kerjasama pemerintah-lingkungan kebijakan untuk adaptasi sektor pariwisata terhadap perubahan iklim di Pasifik Selatan. Dan berdasarkan proyeksi perubahan iklim, pariwisata Pasifik kemungkinan terkena dampak sebagai berikut; kenaikan suhu sebesar 0,5-2°C pada tahun 2030 dan 1-7°C pada tahun 2070, kepulauan Pasifik akan sangat rentan terhadap kenaikan permukaan laut dan banyak lagi pengunjung untuk melakukan perjalanan jarak jauh.

Perubahan iklim telah dan akan terus memberikan tekanan pada terumbu karang dan studi organisasi riset industri memproyeksikan dampak perubahan iklim di wilayah pasifik sebagai berikut; arus dan permintaan pariwisata-PIC berlokasi jauh sehingga membutuhkan internasional Oseania tidak punya pilihan lain selain transportasi udara dan air karena keterbatasannya; infrastruktur dengan sebagian besar infrastruktur berbasis pesisir, pariwisata masuk kemudian meningkatnya curah hujan selama musim muson musim panas dalam beberapa dekade mendatang.

Dalam skala global permukaan laut mengalami erosi pantai dan pemutihan karang yang akan mengakibatkan penurunan daya tarik destinasi. Sehingga diperlukan upaya terpadu untuk memperkuat ketahanan sektor ini terhadap berbagai tantangan dan resiko perubahan iklim. Mengingat sebagian besar kegiatan di kawasan ini berskala kecil, yang mana pemerintah memainkan peranan penting dalam mengkoordinasikan dan mendanai kegiatan adaptasi perubahan iklim. Oleh karena itu, studi kebijakan publik dan lingkungan kebijakan penting untuk meningkatkan kapasitas adaptasi sektor pariwisata. Selain itu, pemahaman terhadap lingkungan kebijakan memberikan konteks untuk rekomendasi kebijakan di masa depan dan memberikan informasi bagaimana rekomendasi tersebut dapat diterapkan. Sebagai bagian dari proyek yang lebih besar yang bertujuan untuk mengembangkan kebijakan dan strategi adaptasi perubahan iklim untuk membantu sektor pariwisata kepulauan Pasifik dalam melindungi dan mengembangkan mata pencaharian lokal (E. Wong et al., 2012).

Kelima, literature ini berjudul *Tourism and hospitality research evaluation of policy environment for climate change adaptation in tourism*, ditulis oleh Emma Wong, Dale Dominey-Howes, Min Jiang, Terry Delacy (E. Wong et al., 2013).

Literatur ini menjelaskan mengenai tiga aspek lingkungan kebijakan yang dianalisis yaitu komitmen pemangku kepentingan, ketersediaan dan kapasitas sumberdaya dan adanya mekanisme atau proses yang memungkinkan.

Adanya perbedaan dalam menemukan kebijakan lingkungan yang kondusif di antara ketiga negara yaitu Samoa, Fiji dan Vanuatu. Perbedaan ini disebabkan ketidakstabilan politik dan kurangnya koordinasi kelembagaan di Fiji dan Vanuatu, para pelaku industri menunjukkan sedikit kepedulian terhadap perubahan iklim dan kurangnya implementasi kebijakan. Para pemangku kepentingan harus memiliki rasa kepemilikan terhadap isu-isu perubahan iklim dan pemerintahan harus mengelola pendanaan dari lembaga-lembaga bantuan dengan lebih baik dan menetapkan mekanisme kebijakan yang memfasilitasi adaptasi perubahan iklim.

Kebijakan perubahan iklim sering kali dirumuskan pada tingkat nasional dan tidak selalu menjawab kebutuhan spesifik sektor-sektor ekonomi. Dalam penelitian terhadap evaluasi lingkungan kebijakan untuk adaptasi perubahan iklim di bidang pariwisata. Australia memungkinkan mekanisme atau proses yang memfasilitasi lingkungan pembuatan kebijakan publik dalam tiga besar lingkungan kebijakan merujuk pada konteks dimana kebijakan tersebut berada sarana, bakat, tenaga kerja yang mendukung pembuatan dan implementasi kebijakan dan kehadiran adaptasi sektor terhadap perubahan iklim dan mengkaji penelitian dengan memberikan rekomendasi yang konstruktif dan praktis kepada pembuat kebijakan dan pemangku kepentingan lainnya mengenai kemajuan dalam agenda adaptasi.

Ketersediaan dan kapasitas sumberdaya, menetapkan pentingnya pariwisata negara-negara sebagai studi kasus dalam tiga dimensi; pemangku kepentingan organisasi yang terlibat dalam kebijakan; teori politik dan kerja lapangan di ketiga

lingkungan kebijakan hingga adaptasi perubahan iklim pada sektor pariwisata di ketiga negara tersebut, kemajuan yang telah dicapai dalam penelitian perubahan iklim. Dan adaptasi terhadap perubahan iklim memiliki biaya yang besar dan memberikan tekanan besar terhadap sumberdaya pemerintah di negara-negara berkembang (E. Wong et al., 2013).

**Tabel 2.1 Tinjauan Literatur**

<b>No</b>	<b>Judul</b>	<b>Penulis</b>	<b>Persamaan</b>	<b>Perbedaan</b>
<b>1</b>	A framework for analysing intergovernment	Emma Wong, Nina Mistilis dan Larry Dwyer	Pembahasan mengenai kolaborasi antar pemerintah di bidang pariwisata diantara negara-negara ASEAN dalam upaya berkelanjutan dengan membangun, memajukan dan melindungi kepentingan bersama anggota.	Hanya berfokus kepada kebijakan pemerintah mengenai karantina kepada wisatawan dalam menghadapi New Normal
<b>2</b>	Implementasi ASEAN Tourism strategic Plan	Haiyyu Darman Moenir	Kebijakan di masa pemerintahan jokowi yang khususnya dalam masa pandemi	Berfokus kepada implementasi ATSP 2011-2016 dalam kebijakan

	2011-2015 dalam kebijakan pariwisata Indonesia di masa pemerintahan Jokowi		serta cara pengimplementasian dari ASEAN Strategic Plan di Indonesia	pariwisata di Indonesia, sehingga tidak berkaitan dengan adanya Covid-19
3	Implementasi ASEAN Tourism Strategic Plan di Indonesia tahun 2016-2020	Vivin Wulandari	Membahas implementasi dari ATSP 2016-2020 di Indonesia, dan membicarakan bagaimana upaya pemerintah dalam pengimplementasian dengan tantangan yang terjadi pada seluruh dunia	Berfokus kepada implementasi ATSP 2016-2020 yang berfokus pada Indonesia dan tidak terlalu fokus ke bagaimana strategi dan kebijakan pemerintah dalam mengatasi serta mengembangkan pariwisata pasca Covid-19
4	Policy environment for the tourism sector's	Emma Wong, Terry Delacy,	Pembahasan mengenai perlunya kerjasama/koordinasi antara pemerintah	Berfokus pada satu wilayah di kepulauan pasifik yaitu Samoa



	adaptation to climate in the south pacific – the case of samoa	Min Jiang, David Harrison	dengan masyarakat serta organisasi lain dalam mengantisipasi dan mengatasi adanya perubahan iklim serta memberi perlindungan terhadap negaranya.	berbeda dengan penelitian ini yang melihat beberapa negara di Asia Tenggara.
5	Tourism and hospitality research evaluation of policy environment for climate change adaptation in tourism	Emma Wong, Dale Dominey-Howes, Minjiang, Terry Delacy	Pembahasan mengenai pengelolaan destinasi wisata dalam perlindungan terhadap perubahan iklim yang terjadi di sebuah kawasan yang sering terjadi peristiwa diakibatkan perubahan iklim	Perbedaan terletak pada fokus kawasan dalam penanganan dan pembuat kebijakan dari setiap pemerintah yang ada di setiap negaranya. Begitupun dengan penelitian ini.

## **2.2.Kerangka Teoritis/Konseptual**

### **2.2.1. *Rezim Internasional***

Teori Rezim adalah satu teori hubungan internasional yang berasal dari tradisi liberal. Teori rezim berpendapat bahwa suatu organisasi internasional atau rezim internasional dapat mempengaruhi suatu negara atau mempengaruhi pelaku internasional lainnya. Teori rezim juga menyarankan bahwa kerjasama dapat terjadi dalam sebuah sistem anarki dunia karena rezim lahir dari sebuah kerjasama internasional. Rezim internasional diorganisasikan dengan perjanjian antar negara yang dapat menjadi sumber utama hukum internasional.

Rezim sendiri merupakan hasil dari ketidakpuasan aktor dalam menjalankan ketergantungan satu sama lain meskipun dari kaum realis tidak setuju dengan keadaan dari rezim itu sendiri. Tetapi, sebagai hasil dari institusi atau kerjasama, rezim menempati posisi kuat dalam hubungan internasional. Rezim memiliki fungsi yang penting dalam hubungan antar negara. Ketika rezim dilembagakan yang mempertahankan keutuhannya dan memiliki kekuatan politik melebihi independensi negara-negara yang membentuknya.

Menurut Krashen menyebutkan bahwa dalam pembentukan rezim internasional terdapat hal mutlak dan menjadi ciri pembentukan sebuah rezim; pertama *Principles*, merupakan kepercayaan atas fakta suatu kejadian atau peristiwa, sebab dan akibat dalam pembentukan suatu rezim juga berdasarkan kejujuran (seperti halnya peristiwa dampak dari perubahan iklim bagi pariwisata). Kedua *Norms*, merupakan standar perilaku yang dituangkan dalam hak dan kewajiban (sesuai dengan yang telah disepakati bersama pada saat pembentukan ATSP setiap negara anggota memiliki hak menyampaikan poin permasalahan yang

ada di setiap negara anggota untuk dijadikan sebagai bahan peninjauan kembali poin dalam ATSP itu sendiri). Ketiga *Rules*, merupakan bentuk ketentuan dan larangan yang spesifik berkenaan dengan perilaku aktor dalam menerapkan rezim (negara perlu melihat poin dari ATSP untuk mengimplementasikan di setiap negara anggota sesuai dengan masing-masing negara). Keempat *Decision Making Procedures*, merupakan praktek umum untuk membuat dan mengimplementasikan sebagai sebuah norma dalam mengambil keputusan bersama atau *collective choices* ( setiap negara anggota dalam pengimplemntasian ATSP memiliki kesepakatan bersama dalam poin yang ada di dalam ATSP untuk diterapkan di setiap negara anggota sesuai dengan point tersebut tanpa melanggar kesepakatan dan juga harus disesuaikan dengan kondisi daripada negara anggota itu sendiri) (Prayuda et al., 2017)

Menurut Li Haas berpendapat bahwa sebuah rezim mencakup seperangkat prosedur, peraturan dan norma yang saling koheren. Bull Hedley, menggunakan beberapa hal yang berbeda mengacu pada pentingnya peraturan dan institusi di masyarakat internasional dimana peraturan mengacu pada prinsip-prinsip penting umum yang memerlukan atau memberi otorisasi kelas ditentukan dari orang atau kelompok untuk berperilaku dengan cara yang ditentukan. Institusi untuk banteng membantu mengamankan kepatuhan terhadap peraturan dengan merumuskan, berkomunikasi, mengelola, menegakkan, menafsirkan, melegitimasi, dan menyesuaikannya. Seperti tujuan rezim yaitu untuk memfasilitasi kesepakatan.

Keohane menyatakan bahwa dalam rezim sistem internasional berasal dari kesepakatan sukarela di antara pelaku yang yuridis. Stein menyatakan bahwa konseptualisasi rezim yang dikembangkan berakar pada karakteristik klasik politik

internasional sebagai hubungan entitas *sovereign* yang didedikasikan untuk pelestarian diri mereka sendiri, akhirnya dapat hanya bergantung pada diri mereka sendiri, dan sebelum dipaksakan untuk memaksa. Dalam dunia negara-negara berdaulat, fungsi dasar rezim adalah untuk mengkoordinasi perilaku negara untuk mencapai hasil yang diinginkan dalam berbagai bidang-bidang (Krasner, 1982).

Seperti halnya *ASEAN Tourism Strategic Plan 2016-2025* merupakan sebuah rezim internasional yang mengacu pada pentingnya peraturan, institusi masyarakat serta prinsip, norma, pengambilan keputusan dalam pembentukan ATSP itu sendiri, dengan tujuan yang sama antar negara anggota ASEAN dalam membantu mengamankan kepatuhan terhadap peraturan dengan merumuskan, berkomunikasi, mengelola, menegakkan, melegitimasi serta menyesuaikan permasalahan atau peristiwa yang terjadi di lingkup anggota. Sehingga isi dari ATSP itu sendiri merupakan hasil atas kesepakatan bersama anggota ASEAN seperti tujuan daripada rezim itu sendiri.

### **2.2.2. Konsep Pariwisata**

Salah satu sektor ekonomi yang paling menguntungkan adalah pariwisata. Pariwisata merupakan tindakan dan proses menghabiskan waktu jauh dari rumah untuk mencari rekreasi, relaksasi dan kesenangan, sambil memanfaatkan penyediaan layanan komersial. Pariwisata merupakan produk tatanan sosial modern, yang dimulai di Eropa Barat pada abad ke-17, meskipun pariwisata telah ada pada zaman klasik. Jadi, penting bagi setiap negara untuk meningkatkan potensi pariwisatanya. Pariwisata adalah sistem yang saling keterkaitan, terdiri dari wisatawan juga komunitas jasa yang menyediakan berbagai fasilitas, atraksi, transportasi dan akomodasi untuk memudahkan perjalanan.

Pariwisata dikembangkan dengan dibedakan berdasarkan geografis diantaranya: Pariwisata lokal merupakan kepariwisataan yang ruang lingkup lebih kecil serta terbatas dalam tempat tertentu. Pariwisata regional juga dikenal sebagai pariwisata regional adalah jenis pariwisata yang lebih fokus pada suatu wilayah tertentu seperti regional di tingkat nasional atau regional di tingkat global. Pariwisata nasional berada di dalam wilayah suatu negara. Yang terdiri dari warga negara dan juga orang asing yang berdiam di negara tersebut. Pariwisata regional-internasional, kegiatan pariwisata dalam wilayah internasional yang terbatas tapi melewati batas lebih dari dua hingga tiga negara seperti ASEAN. Pariwisata internasional (*international tourism*) pariwisata yang terdapat atau dikembangkan di seluruh dunia (Ley 25.632, 2002) .

Disisi lain pariwisata juga dibagi berdasarkan pada jenis-jenis pariwisata diantaranya: Pariwisata Etnik, khususnya perjalanan untuk mengamati ekspresi budaya serta gaya hidup masyarakat. Pariwisata Budaya, perjalanan untuk menyelami atau untuk merasakan suatu cara hidup yang sudah menghilang dari ingatan manusia. Pariwisata Rekreasi, kegiatan wisata yang menitikberatkan pada olahraga, untuk menghilangkan stress, dan kontak sosial dalam suasana santai. Pariwisata Alam, adalah perjalanan ke suatu tempat yang masih asli, atau tidak tercemar dengan tujuan mempelajari, mengagumi, dan menikmati bentang alam, satwa liar, dan peristiwa-peristiwa kebudayaan yang pernah atau sedang ada ditempat tersebut.

Pariwisata perkotaan, khususnya perjalanan ke suatu kota untuk menikmati pemandangan, satwa liar, dan acara kebudayaan yang ada di sekitar lokasi. Kota peristirahatan, kota atau desa yang penghidupannya bergantung pada penyediaan

sarana atau prasarana pariwisata, khususnya akomodasi, restoran, olahraga, hiburan, dan jasa pariwisata kalender lain. Pariwisata pertanian, yang meliputi perdesaan atau wisata pertanian adalah pariwisata untuk mempelajari dan meneliti kegiatan pertanian, peternakan dan kehutanan. Jenis pariwisata tersebut memiliki tujuan untuk mendorong wisatawan memikirkan alam dan kelestariannya (Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Bogor, 2018).

Jika dilihat dari perspektif lingkungan, pariwisata membantu lingkungan karena tempat wisata akan dikunjungi oleh wisatawan yang akan membuat mereka terbiasa untuk menjaga dan merawat lingkungan dengan baik. Pembangunan pariwisata tidak berdampak negatif terhadap lingkungan dan menurunkan kualitas tanah, baik pertanian baik itu lahan perladangan. Masyarakat secara kolektif setuju untuk melestarikan hutan tanpa bergantung padanya (Saragih & Surya, Elfitra Desy, B, 2021).

Dengan begitu PBB dan UNWTO mulai memikirkan pengembangan pariwisata untuk kedepannya salah satunya melalui sistem pariwisata berkelanjutan. Organisasi pariwisata dunia (UNWTO) mendefinisikan pariwisata berkelanjutan sebagai pariwisata yang memperhitungkan secara penuh dampak ekonomi, sosial dan lingkungan saat ini dan masa depan, dengan memenuhi kebutuhan pengunjung, industri, lingkungan dan masyarakat tuan rumah. Berdasarkan majelis umum PBB ke-70, tahun 2017 ditetapkan sebagai tahun internasional pariwisata berkelanjutan untuk pembangunan. Dimana sepanjang tahun UNWTO dan sistem PBB lebih berupaya meningkatkan kesadaran akan kontribusi pariwisata berkelanjutan terhadap pembangunan di kalangan pengambil keputusan sektor publik dan swasta serta masyarakat.

Berisikan peran pariwisata dalam lima bidang utama yang dipromosikan diantaranya; (1) pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, (2) inklusivitas sosial, lapangan kerja dan pengentasan kemiskinan, (3) efisiensi sumberdaya, perlindungan lingkungan dan perubahan iklim, (4) nilai-nilai budaya, keragaman dan warisan, (5) saling pengertian, perdamaian dan keamanan (UNWTO, 2016).

Pariwisata berkelanjutan memiliki semua jenis pariwisata dan semua jenis lokasi, termasuk pariwisata massal dan pariwisata khusus. Itu diatur oleh standar manajemen keberlanjutan untuk pengembangan pariwisata. Pariwisata berkelanjutan bergantung pada konsep keberlanjutan yang mengacu pada perkembangan sektor lingkungan, ekonomi, dan sosial budaya. Untuk menjamin keberlanjutan dalam jangka panjang, ketiga aspek ini harus diimbangi dengan cara yang tepat. Oleh karena itu, pariwisata berkelanjutan harus: Memanfaatkan dengan baik sumber daya yang ada merupakan bagian dari pertumbuhan pariwisata, menjaga proses ekologi juga membantu melestarikan warisan alam dan keanekaragaman hayati. Menghargai keaslian sosio-kultural komunitas tuan rumah, melestarikan warisan budaya dan nilai-nilai tradisional yang mereka serta mendorong pemahaman dan toleransi antar budaya. Menjamin operasi ekonomi yang berkelanjutan dan berjangka panjang, memberikan manfaat ekonomi kepada semua pemangku kepentingan secara merata, seperti lapangan kerja yang stabil, peluang untuk memperoleh pendapatan dan pelayanan sosial kepada masyarakat miskin dan membantu memerangi kemiskinan (UNWTO, 2016).

### **2.2.3. International Tourism**

Pada abad ke-21 pariwisata internasional telah menjadi salah satu kegiatan ekonomi terpenting di dunia, dan dampaknya semakin nyata. International tourism seperti yang Robert Christie Mill dan Alastair M. Morrison (1992) jelaskan di dalam buku *The Tourism System ; An Introductory text*, mengatakan:

“Dari sudut pandang gambar saat ini dianggap dalam istilah ambigu. Tidak ada definisi tourisme yang diterima secara universal. Terdapat hubungan antara pariwisata, perjalanan, rekreasi, dan waktu senggang, namun hubungannya tidak jelas. Jika pariwisata melibatkan perjalanan, namun perjalanan tidak semua berjalan adalah pariwisata. Semua kegiatan wisata terjadi pada waktu senggang, namun tidak semua waktu senggang diberikan untuk kegiatan wisata. Definisi pariwisata sebagai suatu industri dengan batas-batas yang jelas akan membantu baik mereka berada di dalam maupun diluar pariwisata untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang apa yang dimaksud dengan pariwisata. Dengan gambaran yang jelas akan memperoleh pemahaman yang lebih baik”. Sementara menurut Spillane (1991) menyebutkan suatu perjalanan dapat dikatakan sebagai perjalanan wisata setidaknya memenuhi 3 kriteria : Harus bersifat sementara, harus bersifat sukarela, dalam arti tidak dipaksa, dan tidak bekerja dalam hal ini menghasilkan upah atau bayaran.

Menurut Organisasi Pariwisata Dunia PBB yaitu United Nation World Tourism Organization (UNWTO) pariwisata merupakan fenomena sosial, budaya, dan ekonomi dimana orang akan berpindah ke negara atau tempat di luar lingkungan biasanya untuk alasan pribadi, bisnis atau lainnya (United Nations World Tourism & Organization, 2016). Pariwisata internasional merupakan salah



satu cara untuk meningkatkan perekonomian negara. Sedangkan pariwisata merupakan suatu aktivitas seseorang dari satu tempat ke tempat lain dalam jangka waktu singkat ataupun sementara.

WTO mengatakan bahwa ada tiga jenis pariwisata; pertama, *domestic tourism*, yang berarti orang yang melakukan perjalanan wisata dalam wilayah negaranya sendiri. Kedua, *inbound tourism*, yang berarti orang yang tidak melakukan perjalanan wisata di negara tertentu. Ketiga, *outbound tourism*, berarti orang yang melakukan perjalanan wisata ke negara lain. Selain itu, perjalanan *international tourism* mencakup *inbound* dan *outbound tourism*. Dan dalam kerjasama ASEAN di dalam sektor pariwisata berusaha menjadikan objek wisata di kawasan dapat menjadi objek pariwisata internasional dengan sistem standar bersama. Dengan cara memfasilitasi semua kegiatan wisatawan yang berasal dari dalam maupun luar negeri untuk merasa nyaman dan aman (E. P. Y. Wong et al., 2010)

#### **2.2.4. Dampak lingkungan terhadap pariwisata**

Lingkungan merupakan organisme dengan segala sesuatu yang ada di sekeliling organisme yang terkait, yang memiliki pengaruh pada eksistensi organisme yang bersangkutan (Mutakin, 2018). Perlindungan lingkungan dan perubahan iklim menjadi salah satu point yang sedang difokuskan oleh PBB, seperti pada Konvensi kerangka kerja PBB tentang perubahan iklim (UNFCCC) dapat dianggap sebagai kerangka kebijakan yang membentuk dan mempengaruhi kebijakan perubahan iklim di sebagian besar negara. Konvensi ini diperkenalkan pada tahun 1992 pada KTT Bumi PBB di Rio de Janeiro, Brasil, dan ditandatangani oleh 166 negara pada musim panas.

Tujuan akhir dari perjanjian ini adalah untuk menjaga konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer pada tingkat yang menghindari gangguan berbahaya yang disebabkan oleh manusia terhadap sistem iklim. Tingkat tersebut harus dicapai dalam jangka waktu yang cukup agar ekosistem dapat beradaptasi secara alami terhadap perubahan iklim, memastikan bahwa produksi pangan tidak terancam dan menciptakan kondisi bagi pembangunan ekonomi berkelanjutan. Namun secara internasional pada tahun 1990an, sebagian besar perhatian dan upaya pembuatan kebijakan dicurahkan hanya pada penetapan target dan mitigasi emisi saja.

Hingga tahun 2004, program pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP) menerbitkan beberapa pedoman kebijakan rinci yang sangat dibutuhkan untuk adaptasi. Berjudul ‘kerangka kebijakan adaptasi perubahan iklim; mengembangkan strategi, kebijakan dan tindakan’ dokumen ini merupakan peta jalan bagi negara-negara untuk mengevaluasi dan melengkapi proses perencanaan yang ada untuk mengatasi adaptasi perubahan iklim. Tidak ada kebijakan yang satu ukuran untuk semua dalam adaptasi. Seperti yang disarankan dalam dokumen UNDP penting bagi negara-negara untuk mengkaji risiko spesifik, kerentanan, dan kapasitas adaptasi mereka, serta mengembangkan serangkaian strategi adaptasi yang disesuaikan.

Oleh karena itu, mempelajari lingkungan kebijakan di suatu destinasi merupakan hal yang penting karena hal ini dapat memberikan informasi kepada pembuat kebijakan, sumberdaya, atau tindakan apa yang sudah ada yang dapat membantu memfasilitasi adaptasi, dan hal apa saja yang masih belum perlu dilakukan. Lingkungan pada dasarnya merupakan bagian penting bagi pariwisata karena menyajikan sumber daya alam yang melimpah ruah bagi manusia. Namun,

pengelolaan sumber daya alam perlu dilakukan oleh setiap individu maupun oleh pemerintah untuk melindungi dari adanya potensi perubahan iklim dan hal lainnya yang dapat memberikan dampak bagi pariwisata.

Seperti penipisan sumber daya alam dimana perkembangan pariwisata menekan sumber daya alam apabila hal itu meningkatkan konsumsi di daerah-daerah yang sumber dayanya sudah langka. Selain itu juga potensi negara yang sering mengalami kejadian fenomena alam yang diakibatkan terjadinya perubahan iklim seperti banjir, gempa bumi, longsor, tsunami dan lainnya dapat menyebabkan adanya rasa khawatir terhadap keamanan wisatawan asing untuk berkunjung. Dampak lingkungan atau perubahan iklim yang sedang terjadi di Asia Tenggara dan dunia diantaranya perubahan suhu yang meningkat yang diakibatkan pemanasan global serta konsentrasi gas rumah kaca yang meningkat, hingga suhu permukaan juga meningkat.

Seperti yang terjadi di benua Eropa pada tahun lalu, kemudian di Indonesia, China, Thailand, Bangladesh, Myanmar. Temperature yang tinggi dapat meningkatkan jumlah penyakit terkait panas dan mempersulit para pekerja yang bekerja di luar ruangan. Kebakaran hutan yang mudah terjadi dan cepat menyebar saat kondisi lebih panas. Bahkan suhu Arktik telah meningkat setidaknya dua kali lebih cepat dibandingkan rata-rata global.

Badai yang lebih parah dan sering terjadi di banyak wilayah. Seiring meningkatnya suhu, semakin banyak air yang menguap dan hal tersebut dapat memperburuk curah hujan ekstrim dan banjir sehingga menyebabkan lebih banyak badai yang merugikan. Peningkatan suhu lautan juga mempengaruhi intensitas dan kedalaman badai tropis. Dengan air, siklon, hurikan dan taifun menjadi lebih kuat

ketika ada air hangat di permukaan laut dan badai tersebut sering kali menghancurkan rumah dan komunitas, menyebabkan banyak kematian dan kerugian ekonomi yang besar.

Perubahan iklim dan kekeringan meningkatkan kelangkaan air di banyak tempat. Pemanasan global menyebabkan resiko kekeringan pertanian, yang mempengaruhi tanaman dan kekeringan ekologis yang dapat meningkatkan kerentanan ekosistem. Selain itu, pemanasan global memperburuk kekurangan air di daerah yang mengalami kesulitan air. Selain itu, kekeringan menyebabkan badai pasir dan debu yang menyebabkan gurun menjadi lebih luas dan mengurangi luas lahan pertanian.

Dengan meningkatnya kedalaman laut selama dua puluh tahun terakhir, suhu lautan meningkat lebih cepat, menyerap sebagian besar panas dari pemanasan global. Volume lautan juga meningkat seiring dengan peningkatan suhu karena air memuai saat menjadi lebih hangat. Mencairnya lapisan es juga menyebabkan permukaan laut meningkat, mengancam pulau dan masyarakat pesisir. Selain itu, lautan menyerap karbon dioksida, mengurangi jumlah karbon dioksida di atmosfer. Namun, semakin banyak karbon dioksida membuat lautan lebih asam, yang dapat membahayakan terumbu karang dan biota laut lainnya

Kelaparan dan gizi buruk meningkat di seluruh dunia karena dua faktor; kekurangan makanan dan perubahan iklim yang menyebabkan cuaca ekstrim. Karena suplai makanan dari penggembala, berburu, dan memancing mendapat tekanan panas sehingga membuat sumber air dan padang menjadi panas, sektor perikanan, pertanian, dan peternakan dapat hancur atau menjadi kurang produktif (UN, 2020).

Perencanaan yang baik dan efektif diperlukan untuk industri pariwisata. Metode ini menggabungkan berbagai elemen yang penting untuk pertumbuhan sektor pariwisata. Seperti aspek aksesibilitas (dalam hal transportasi dan pemasaran), ciri-ciri infrastruktur pariwisata, tingkat interaksi sosial, keterkaitan dengan industri lain, daya tahan terhadap dampak pariwisata, tingkat resistensi komunitas lokal adalah beberapa contohnya. Dalam pengembangan pariwisata, lingkungan memiliki dampak bagi pengembangan pariwisata dikarenakan dapat menjadi hal negatif seperti pengaruh cuaca bagi pembangunan infrastruktur dalam menunjang pengembangan pariwisata untuk lebih baik. Bahkan sebaliknya bisa jadi pengembangan pariwisata dapat merusak lingkungan seperti menambah penumpukan sampah, penggunaan energi yang meningkat dan lainnya.

Dampak perubahan iklim dapat dikelompokkan menjadi empat; pertama, dampak langsung, mengacu pada perubahan arus pariwisata akibat dari pola cuaca, penurunan estetika lanskap dan kerusakan infrastruktur pariwisata. Kedua, dampak tidak langsung, kekurangan air, hilangnya keanekaragaman hayati dan meningkatnya penyakit yang ditularkan melalui vektor. Ketiga, dampak terhadap mobilitas wisatawan akibat kebijakan mitigasi baru, seperti pengurangan emisi gas rumah kaca, pajak karbon pada perjalanan jauh, yang mungkin berdampak pada permintaan pariwisata. Dan kelima, dampak tidak langsung dampaknya terhadap masyarakat, seperti pertumbuhan ekonomi, pola pembangunan stabilitas sosial-politik di beberapa wilayah, perubahan sosial dapat mengubah daya tarik destinasi dan permintaan pariwisata secara negatif. Oleh karena itu pariwisata dapat dianggap sebagai sektor ekonomi yang sensitif terhadap perubahan iklim.

### **2.3. Asumsi Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, penulis menarik asumsi sebagai berikut:

“Sejak awal berdiri ASEAN telah berfokus kepada peningkatan ekonomi negara-negara di kawasan yang inklusif. Dalam perkembangannya, sektor pariwisata menjadi sektor penting bagi pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. ASEAN sebagai rezim di kawasan Asia Tenggara telah berupaya menjalankan kerjasama pariwisata sampai dibentuknya ATSP 2011-2015 dan dilanjutkan kembali pada ATSP 2016-2025. Namun, ATSP 2016-2025 masih belum mampu membawa perubahan yang signifikan bagi pariwisata kawasan. Hal ini karena adanya pola implementasi strategi yang terhambat seperti dalam meningkatkan partisipasi masyarakat lokal dan sektor publikasi-swasta dalam rantai nilai pariwisata, menjamin keselamatan dan keamanan, mengutamakan perlindungan dan pengelolaan situs warisan budaya. Dan meningkatkan daya tanggap terhadap perlindungan lingkungan dan perubahan iklim.”

## 2.4. Kerangka Analisis

